



**MOTIF MASYARAKAT KABUPATEN BOGOR MEMILIH GOLPUT  
PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024  
DALAM PERSPEKTIF ANALISIS INTERAKSIONISME SIMBOLIK**

**Mustaqim<sup>1</sup>**

[mustaqim@uic.ac.id](mailto:mustaqim@uic.ac.id)

Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ibnu Chaldun Jakarta

**Rambang Basari<sup>2</sup>**

[rambangbasari@uic.ac.id](mailto:rambangbasari@uic.ac.id)

Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ibnu Chaldun Jakarta

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Ibnu Chaldun  
Jl. Pemuda I Kav. 97 Rawamangun, Jakarta 13220

---

**ABSTRAK**

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak hanya memilih pasangan calon presiden-wakil presiden, tapi juga calon anggota legislatif untuk DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Dewan Perwakilan Daerah RI. Salah satu fenomena menarik dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 adalah partisipasi pemilih, yang di antaranya masih didasarkan pada pragmatisme dibanding rasionalitas dalam menjatuhkan pilihan politik. Partisipasi politik pemilih cenderung dimobilisasi (*mobilized participation*) daripada yang otonom (*autonomous participation*). Penelitian ini merupakan kebaruan dari penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh peneliti yang sama pada 2014, atau periode Pemilu 10 tahun yang lalu.

Fenomena pengguna hak pilih yang tidak menggunakan hak pilih atau 'golongan putih' (golput) di Pemilu 2024 tetap menjadi bahan kajian yang menarik, meski terjadi peningkatan partisipasi pemilih dibanding dengan Pemilu 2014. Fokus penelitian kali ini adalah memahami dan menjelaskan motif masyarakat di lima kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memilih golput pada Pemilu Legislatif 2024 dan menjelaskan makna Pemilu Legislatif bagi golput.

Pendekatan Interaksionisme Simbolik yang digagas oleh George Herbert Mead masih signifikan digunakan dalam penelitian ini, dimana pandangan mengenai perilaku individu dapat dipahami dan dijelaskan melalui kerangka mind, self, dan society seorang golput. Selain itu, tinjauan kepustakaan mengenai konsep komunikasi politik juga membawa pengaruh besar sebagai ruang lingkup penelitian. Argumentasi mengenai partisipasi politik sebagai substansi dari sebuah sistem demokrasi juga memiliki relevansi dalam memahami fenomena golput. Penelitian ini berada dalam paradigma konstruktivis, menggunakan pendekatan kualitatif

deskriptif dan metode studi kasus di lima kecamatan (Kec. Cibinong, Citeureup, Bojong Gede, Gunung Puteri, dan Cileungsi) sebagai representasi memahami motif golput dan makna Pemilu Legislatif.

Penelitian ini masih menemukan bahwa sikap tidak percaya masyarakat menjadi motif golput. Beberapa sikap tidak percaya itu terbagi atas motif idealis, motif *experience*, motif institusional, individualis, dan motif *proximity*.

**Kata Kunci :** Motif, Golput, dan Pemilu Legislatif

### ABSTRAC

The implementation of the 2024 General Election (Election) will not only elect presidential and vice presidential candidate pairs, but also legislative candidates for the House of Representatives of the Republic of Indonesia, provincial DPRD, district/city DPRD, and the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia. One of the interesting phenomena in the implementation of the 2024 election is voter participation, which is still based on pragmatism rather than rationality in making political choices. Voter political participation tends to be mobilized (mobilized participation) rather than autonomous (autonomous participation). This research is a novelty of previous research that has been carried out by the same researcher in 2014, or the election period 10 years ago.

The phenomenon of voters who do not use their right to vote or the 'white group' (golput) in the 2024 election remains an interesting subject for study, even though there has been an increase in voter participation compared to the 2014 election. The focus of this research is to understand and explain the motives of the people in five sub-districts in Bogor Regency, West Java, to vote for golput in the 2024 Legislative Election and explain the meaning of the Legislative Election for golput.

The Symbolic Interactionism approach initiated by George Herbert Mead is still significantly used in this study, where the view of individual behavior can be understood and explained through the framework of the mind, self, and society of a golput. In addition, the literature review on the concept of political communication also has a great influence as the scope of research. The argument regarding political participation as the substance of a democratic system also has relevance in understanding the golput phenomenon. This research is in a constructivist paradigm, using a descriptive qualitative approach and case study methods in five sub-districts (Cibinong, Citeureup, Bojong Gede, Gunung Puteri, and Cileungsi Districts) as a representation of understanding the motives of golput and the meaning of the Legislative Election.

This research still finds that public distrust is the motive for golput. Some of these distrustful attitudes are divided into idealistic motives, experiential motives, institutional motives, individualist motives, and proximity motives.

**Keywords:** Motive , Golput, and Legislative Election

## PENDAHULUAN

Hasil penelitian ini merupakan kebaruan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti yang sama pada sepuluh tahun yang lalu atau pasca Pemilu 2014. Fenomena pemilih hak pilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau 'golongan putih' (golput) dalam Pemilu 2024 masih terjadi. Walau mengalami penurunan dalam kuantitas dibanding pada Pemilu 2014, tetapi alasan pilihan untuk golput tetap tidak bergeser dari preferensi politik pemilih yang kritis dan rasional.

Golput bukan fenomena baru di tengah-tengah sistem demokrasi Indonesia. Tercatat dari Pemilu era Reformasi tahun 1999 tingkat partisipasi politik masyarakat menurun atau meningkatnya angka golput. Fenomena ini tidak terjadi dalam skala nasional saja, tetapi secara masif terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia yang mengadakan pemilihan kepala daerah.

Golput muncul pertama kali dalam Pemilu 1971. Pada era Presiden Soeharto, golput menyatakan protes terhadap tirani kekuasaan dan pemilu yang selalu dimanipulasi. Bagi rezim Orde Baru golput adalah virus ganas yang harus dihadang. Golput bahkan dikategorikan sebagai bagian dari tindakan makar, padahal tidak ada aturan konstitusi atau undang-undang (UU) yang menyatakan memilih sebagai kewajiban. Berbeda dengan saat ini, ketika keran-keran demokrasi telah dibuka secara luas, orang-orang sudah tidak lagi sembunyi-sembunyi untuk mengatakan 'tidak' pada pemilihan umum. Orang-orang telah sangat berani menyatakan sikap, mulai dari masyarakat biasa tanpa potensi keterpilihan hingga tokoh-tokoh masyarakat, politik dan negarawan.

Sekedar catatan, sebelum pemilihan umum tahun 2014 angka golput sejak pemilihan umum era Reformasi tahun 1999, 2004 dan 2009 terus mengalami peningkatan baik itu pemilihan legislatif dan pemilihan presiden-wakil presiden. Pada Pemilu 1999, pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya alias golput adalah 7,2%. Puncak penurunan partisipasi itu terjadi saat Pemilu 2004. Dalam tiga rangkaian pemilu yang diselenggarakan secara berurutan kala itu, sebanyak 16 persen dari pemilih terdaftar tidak menyumbangkan suaranya untuk pemilu legislatif. Kemudian, angka ini mengalami kenaikan menjadi 21,77 persen saat pilpres putaran pertama. Angka ini kembali mengalami kenaikan saat pilpres putaran kedua menjadi 23,37 persen.

Banyak pandangan tentang pilihan golput tersebut dan semakin banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Setidaknya ada beberapa hal penting tentang kenapa harus menggunakan hak pilihnya dengan baik. Pertama, pilihan untuk tidak memilih (golput) merupakan bentuk pemborosan terhadap APBN (untuk pemilu legislatif dan presiden) serta APBD untuk pilkada. Kedua, golput juga akan menguntungkan calon yang belum tentu berkualitas atau disukai. Artinya, calon bisa menang hanya dengan perolehan suara rendah atau hanya mempunyai basis massa sedikit karena lebih banyak masyarakat yang golput.

Ini mengakibatkan legitimasi kekuasaan calon terpilih akan berkurang. Dalam pemilihan secara langsung seperti saat ini, maka calon yang terpilih akan merasa bahwa ia pilihan “rakyat” dan bebas melakukan apa yang dikehendakinya. Justru hal ini menjadi bumerang bagi golput.

Dalam perspektif komunikasi politik, perilaku golput merupakan bagian dari *voter behaviour* dimana berbagai kondisi sosial warga negara atau *voter* mempengaruhi sikap masyarakat dalam memilih ataupun tidak memilih. Berbagai kondisi sosial tersebut terutama disponsori oleh bagaimana komunikasi politik dibangun oleh para aktor politik. Dalam kontestasi politik Pemilu Legislatif (Pileg) 2024, komunikasi politik memiliki peranan penting dalam memberikan argumentasi yang kuat kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif sebagai pemilih.

Argumentasi ini membawa peranan penting komunikasi politik dalam masyarakat yang memilih untuk golput. Keputusan masyarakat untuk tidak memilih (golput) dalam hal ini juga dapat dikatakan sebagai sebuah komunikasi politik yang dilakukan oleh warga negara dengan berbagai macam motif dan pandangan dalam melihat proses demokrasi di Indonesia. Golput sebagai sebuah komunikasi politik, yakni *voter behaviour* berupaya untuk menyampaikan pesan kepada negara – penyelenggara pemilu dan masyarakat sendiri, dimana ketidakpuasan akan hasil pemilu dan segala unsur pendukung demokrasi (KPU, Bawaslu, DKPP, parpol, hingga para calon anggota legislatif). Ketidakpuasan ini dan perbedaan pandangan mengenai proses demokrasi menjadikan golput sebagai satu hal yang mesti dipahami sebagai bagian dari proses demokrasi dan komunikasi politik.

Pandangan tentang penyebab seseorang untuk memilih tidak memilih atau golput pun juga bermacam-macam. Mulai dari golput ditengarai berkat degradasi kepercayaan terhadap partai peserta pemilu, masyarakat yang apatis karena jenuh dengan janji-janji yang minim realisasi, dan masyarakat yang memandang skeptis terhadap kampanye para caleg, di mana mereka terkesan hanya pandai memajang poster, yang justru kerap merusak lingkungan. Tentunya hal ini memiliki posisi tersendiri dan menjadi catatan bagi peserta pemilu. Apapun alasan dari seseorang untuk memilih golput, dapat dikembalikan pada bagaimana peran negara – lembaga demokrasi dalam melakukan komunikasi politik terhadap warga negara. Ada indikasi yang sangat besar bahwa negara tidak efektif dalam melakukan komunikasi politik yang dapat dilihat pada jumlah golput yang tetap ada.

Hal di atas dapat kita telaah lebih jauh bagaimana melihat motif seseorang untuk memilih golput dengan memahami konsep diri seseorang. Dalam pandangan kaum strukturalis, konsep diri penting dipahami sebagai faktor yang kuat dalam mempengaruhi perilaku sosial, termasuk perilaku politik. Motif berperilaku dan konsep diri memiliki kaitan erat dalam tinjauan komunikasi sosial. Seperti pandangan tokoh Interaksionisme Simbolik, George Herbert Mead, yang mengatakan bahwa makna dibentuk melalui proses komunikasi karena makna tidak

bersifat intrinsik terhadap apapun. Dalam hal ini, penting melihat bagaimana pandangan seorang golput dalam memaknai proses pemilihan umum. Dan pandangan terhadap makna pemilu itu tentunya tidak dapat lepas dari pandangan mengenai konsep diri seorang golput.

Fenomena golput patut mendapat perhatian penting, mengingat proses demokrasi di Indonesia tidak muncul begitu saja, membutuhkan banyak pengorbanan untuk sampai pada level demokrasi saat ini. Salah satu hal yang dapat menjadi point of interest golput adalah bahwa apabila demokrasi merupakan sistem berarti beberapa dari alat atau pendukung kestabilan sistem tersebut tidak berjalan secara baik. Bisa jadi hal ini berupa tidak berfungsinya mesin-mesin pendidikan dan kaderisasi partai politik, dapat juga sosialisasi yang sangat minim terhadap masyarakat. Hal ini akan bermuara pada kesadaran masyarakat tentang makna pemilihan umum terhadap sistem demokrasi Indonesia.

Perlu dipahami bersama bahwa ada beberapa hal yang dapat ditengarai sebagai pengaruh atau faktor dalam membentuk makna pemilu bagi seseorang. Pertama adalah bahwa seseorang bertindak berdasarkan makna yang diberikan orang lain. Hal ini berarti munculnya fenomena golput terjadi dari proses edukasi, informasi yang diberikan terhadap masyarakat tidak berjalan efektif. Kedua adalah makna diciptakan dalam interaksi masyarakat. Hal ini diasumsikan bahwa proses sosialisasi tentang pentingnya pemilu bagi masyarakat juga tidak berlangsung secara terus menerus, simultan dan kontinyu. Ketiga adalah makna dimodifikasi melalui proses interpretatif yang berarti bahwa seorang golput merasa informasi dan atau penting dari pemilu tidak dirasa cukup untuk menggerakkan diri berpartisipasi aktif dalam memilih. Ketiga asumsi di atas berangkat dari asumsi dasar interaksionisme simbolik yang dikemukakan oleh Herbert Mead.

Salah satu fenomena menarik kehadiran golput di wilayah Tanah Air adalah fenomena golput di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kabupaten Bogor memiliki jumlah terbesar pemilih untuk eskalasi kota/kabupaten di Indonesia. Berdasarkan hasil Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) pada 14 Februari 2024, tingkat partisipasi politik warga Kabupaten Bogor dalam menyalurkan hak pilihnya meningkat dibanding Pileg 2014. Ini terlihat dari angka golput yang mengalami penurunan.

Dari 3.889.441 pemilih (1.982.664 pemilih laki-laki dan 1.906.777 pemilih perempuan) yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tercatat 3.275.637 pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Angka itu menunjukkan 84,21 persen dari total pemilih. Itu berarti bahwa terdapat 15,79 persen pemilih yang golput. Sementara pada Pileg 2014, angka partisipasi pemilih tercatat 74,94 persen dari total 3.231.372 pemilih (1.656.984 pemilih laki-laki dan 1.574.388 pemilih perempuan) yang terdaftar di DPT. Angka golput pada tahun 2014 berjumlah 613.804 atau 25,06 persen.

Kabupaten Bogor sebagai wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia untuk tingkat kota dan kabupaten, masyarakat di wilayah ini pada beberapa kecamatan sudah sangat urban, antara lain Kecamatan Cibinong, Cileungsi, Citeureup, Bojong Gede, dan Gunung Putri. Lima kecamatan itu merupakan penyumbang golput yang cukup tinggi di Pemilu Legislatif 2024, yakni Cibinong 16,38%, Cileungsi 17,49%, Citeureup 16,50%, Bojong Gede 18,58%, dan Gunung Putri 17,47%.

Golput dalam terminologi ilmu politik seringkali disebut dengan *non-voter*. Terminologi ini menunjukkan besaran angka yang dihasilkan dari event pemilu diluar *voter turn out* (pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilihnya/tingkat partisipasi memilih). *Non-voter* tersebut dikategorikan menjadi tiga, yakni : (a) *Registered not Voted*, yaitu warga negara yang memiliki hak pilih dan telah terdaftar namun tidak menggunakan hak pilih; (b) *Citizen not Registered*, yaitu kalangan warga negara yang memiliki hak pilih namun tidak terdaftar sehingga tidak memiliki hak pilih; dan (c) *Non Citizen*, mereka yang dianggap bukan warga negara (penduduk suatu daerah) sehingga tidak memiliki hak pilih.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti memfokuskan penelitian mengenai fenomena golput di Kabupaten Bogor pada Pemilihan Umum Legislatif 2024. Fokus penelitian ini adalah : apa motif pemilih untuk tidak memilih (golput) pada Pemilihan Umum Legislatif 2024? dan bagaimana makna Pemilihan Umum Legislatif bagi seorang golput pada Pileg 2024?

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pandangan masyarakat Kabupaten Bogor (Kecamatan Cibinong, Cileungsi, Citeureup, Bojong Gede, dan Gunung Putri) mengenai Pemilihan Umum Legislatif 2024 dan faktor-faktor apa saja yang membuat mereka untuk memilih golput. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami motif pemilih untuk tidak memilih (golput) pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2024 dan untuk memahami makna Pemilihan Umum Legislatif bagi pemilih golput pada Pileg 2024. Hasil penelitian ini diharapkan juga bermanfaat bagi para pihak yang secara teknis berkecimpung di dalam dinamika politik Indonesia, khususnya memberikan manfaat bagi para tokoh politik dalam membangun strategi untuk mendekati golput. Penelitian ini pun diharapkan mampu digunakan sebagai bahan rujukan untuk memberikan gambaran yang lengkap motif golput dan makna pemilu bagi seorang golput.

## **KAJIAN LITERATUR**

Gambaran mengenai studi politik yang memfokuskan kajiannya pada fenomena golput di Indonesia dianggap sebagai kajian yang sangat dinamis. Hal ini dapat terjadi karena kondisi demokrasi di Indonesia sendiri setiap waktunya berubah-ubah

ditambah dengan perbedaan kultur masyarakat di berbagai daerah menyebabkan kajian golput perlu terus dilakukan.

Sebagai bagian dari fenomena politik, golput adalah bagian yang tidak dapat dihindari atau dapat dikatakan sebagai konsekuensi penerapan sistem demokrasi. Golput hadir diyakini bukan hanya sebagai fenomena biasa, tetapi kehadiran golput diyakini sebagai sebuah pesan terhadap proses demokrasi di Indonesia. Untuk memperlancar proses demokratisasi yang sedang berjalan saat ini, tentu membutuhkan komunikasi politik sebagai instrumen untuk melakukan transaksi pesan yang sarat dengan aspirasi, harapan dan keinginan antara rakyat dengan para calon pemimpin yang akan mengendalikan roda pemerintahan ke depan. Komunikasi politik demikian telah menjadi "urat nadi" untuk memperlancar *bargaining* dan sarana agregasi dan artikulasi kehendak publik dalam pemilihan umum sebagai realisasi dari demokrasi.

Adapun konsepsi komunikasi politik, menurut Dan Nimmo, adalah aktivitas komunikasi yang bermuatan politik untuk tujuan kebijakan dengan berbagai konsekuensi yang mengatur tingkah laku manusia dalam keadaan konflik. Artinya, dalam politik, termasuk pemilihan umum tentu terdapat konflik karena beragam keinginan dan kehendak yang amat berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan keinginan dan pilihan itu sendiri bisa dikategorikan benih dari konflik. Namun demikian, konflik bukan merupakan sesuatu yang harus dikhawatirkan, apalagi ditakuti kehadirannya.

Banyak definisi mengenai komunikasi politik yang telah diberikan oleh para pakar, tapi tentunya tidak ada satu definisi pun yang dapat diterima secara universal. Definisi bagus dan paling sederhana dan dekat dalam perspektif golput merupakan sebuah pesan politik adalah definisi yang diberikan oleh Chaffee, sebagaimana dikutip oleh Lynda Lee Kaid (2004), "Political communication is the role of communication in the political process" (komunikasi politik adalah peran komunikasi di dalam proses politik). Definisi singkat yang ditawarkan oleh Chaffee mengandung pengertian bahwa semua aktivitas komunikasi, verbal maupun non-verbal, yang berada dalam proses politik merupakan komunikasi politik. Pengertian "proses politik" dalam definisi tersebut tidak menunjukkan pada proses politik sebagaimana yang terdapat dalam konsepsi "sistem politik," melainkan pada semua kegiatan politik. Dalam pengertian seperti ini, golput dapat dimasukkan ke dalam proses politik. Telaah ini pun menghadirkan pandangan yang berbeda, bukan kepada komunikasi adalah politik, melainkan politik adalah komunikasi.

Pandangan ini bersinergi dengan ungkapan Chaffee: 'politics of communication' yang menganut pengertian 'who get to say what to whom' atau 'siapa mendapat hak mengatakan apa kepada siapa'. Politik komunikasi dalam konteks ini bisa diartikan sebagai suatu hak untuk berkomunikasi dan mengkomunikasikan ide-ide. Oleh karena itu, politik komunikasi yang ideal dapat diandaikan adanya satu hak bagi

siapapun untuk mengkomunikasikan pendapatnya dalam sebuah situasi yang bebas dan kedudukan yang sama antarpartisipan. Pengertian semacam ini mengingatkan kita pada konsep Habermas tentang ruang publik (*public sphere*) dan konsepnya tentang 'ideal speech situation'.

Menurut Habermas (Little Jhon dan Foss, 2005:322), situasi berbicara yang ideal (komunikasi politik) yang mesti dikembangkan dalam masyarakat setidaknya memiliki tiga hal utama. Pertama, komunikasi itu membutuhkan kebebasan berbicara dan tidak boleh ada batasan tentang apa yang dibicarakan. Kedua, semua individu yang terlibat dalam proses komunikasi itu haruslah memiliki kesempatan yang sama untuk menyuarakan pandangannya. Ketiga, norma-norma dan kewajiban masyarakat tidaklah bersifat hak dari sekelompok saja namun terdistribusi ke semua strata sosial yang terdapat dalam masyarakat itu.

Sebagai tinjauan dalam penelitian ini, golput tidak dapat lepas dari berbagai motif. Salah satu yang paling mengemuka dan kontekstual adalah ketidakpahaman seorang golput pada sistem yang berlaku dan ketidakpercayaan seorang golput pada atribut demokrasi yang legal. Terkait dengan ketidakpahaman pada sistem, baik itu sistem demokrasi dan sistem politik yang berlangsung, hal ini mengindikasikan pada fungsi lembaga-lembaga politik dalam mengedukasi masyarakat. Fungsi edukasi politik secara inheren memiliki posisi yang sejajar dengan fungsi komunikasi politik. Pengertian komunikasi politik dapat dirumuskan sebagai suatu proses pengoperan lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan dan cara berfikir serta memengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik.

Fungsi komunikasi politik dapat dibedakan kepada dua bagian. Pertama, fungsi komunikasi politik yang berada pada struktur pemerintah (*suprastruktur politik*) atau disebut pula dengan istilah *the governmental political sphere*, berisikan informasi yang menyangkut kepada seluruh kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah, isi komunikasi ditujukan kepada upaya untuk mewujudkan loyalitas dan integritas nasional untuk mencapai tujuan negara yang lebih luas. Kedua, fungsi yang berada pada struktur masyarakat (*infrastruktur politik*) yang disebut pula dengan istilah *the socio political sphere*, yaitu sebagai agregasi kepentingan dan artikulasi kepentingan, dimana kedua fungsi tersebut sebagai proses komunikasi yang berlangsung di antara kelompok asosiasi dan proses penyampaian atau penyaluran isi komunikasi terhadap pemerintah dari hasil agregasi dan artikulasi tersebut. (Sumarno, 1993:28).

Partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas modernisasi politik. Istilah partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik.

Huntington dan Nelson (1994:4) dalam bukunya "*No Easy Choice Political Participation in Developing Countries*" memaknai partisipasi politik sebagai:

*"By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision-making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective."*

Pandangan di atas mengatakan, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi biasa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Dalam definisi tersebut partisipasi politik lebih berfokus pada kegiatan politik rakyat secara pribadi dalam proses politik, seperti memberikan hak suara atau kegiatan politik lain yang dipandang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan politik oleh pemerintah dalam konteks berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian partisipasi politik tidak mencakup kegiatan pejabat-pejabat birokrasi, pejabat partai, dan *lobbyist professional* yang bertindak dalam konteks jabatan yang diembannya.

Dalam perspektif lain McClosky (1972:20) dalam *International Encyclopedia of the social sciences* menyatakan bahwa:

*"The term "political participation" will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy"*

Atau dapat diterjemahkan, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui makna mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Dapat juga dikatakan partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.

Dalam perspektif pengertian yang generik, Budiardjo (1996:183) memaknai partisipasi politik adalah:

"Kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya".

Berbagai definisi partisipasi politik dari para pakar ilmu politik tersebut di atas secara eksplisit mereka memaknai partisipasi politik bersubstansi *core political activity* yang bersifat personal dari setiap warga negara secara sukarela untuk berperan serta dalam proses pemilihan umum untuk memilih para pejabat publik, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penetapan kebijakan publik.

Selanjutnya secara eksplisit, Huntington dan Nelson (1994:11) membedakan partisipasi politik ke dalam dua karakter, yaitu:

- a) Partisipasi yang demokratis dan otonom adalah bentuk partisipasi politik yang sukarela;
- b) Partisipasi yang dimanipulasi, diarahkan, dan disponsori oleh pemerintah adalah bentuk partisipasi yang dimobilisasikan.

Berdasarkan buku Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, tiga belas penulis merangkum definisi inti yang perlu dicatat dalam partisipasi politik, yakni sebagai berikut:

- a) Ia mencakup kegiatan –kegiatan politik akan tetapi tidak sikap-sikap politik. Dimana kegiatan politik adalah yang objektif dan sikap-sikap politik yang subjektif.
- b) Yang diperhatikan dari partisipasi politik adalah kegiatan politik warga negara preman, atau lebih tepat lagi perorangan-perorangan dalam peranan mereka sebagai warga negara preman. Dengan demikian ada hubungan antara partisipasi-partisipasi politik dan orang – orang profesional di bidang politik.
- c) yang menjadi pokok perhatian dalam partisipasi politik adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Usaha-usaha untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dapat melibatkan usaha membujuk atau menekan pejabat-pejabat untuk bertindak (atau tidak bertindak) dengan cara-cara tertentu.
- d) Menurutny bahwa partisipasi politik mencakup semua kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pemerintah, tak peduli apakah kegiatan itu benar – benar mempunyai efek. Seorang partisipan politik dapat berhasil atau tidak akan dapat berkuasa atau tidak. Dalam pengertian ini, maka kebanyakan partisipan politik mempunyai kekuasaan yang kecil saja dan hanya beberapa partisipan saja yang mencapai sukses yang cukup besar dalam politik.

Samuel P.Huntington dan Joan M. Nelson dalam bukunya menuliskan lebih lanjut bahwa partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai arti. Adapun pengertian tersebut adalah sebagai berikut:

Partisipasi politik itu hanya perilaku, atau mencakup sikap-sikap dan persepsi-persepsi (misalnya persepsi seseorang tentang relevansi politik bagi urusannya sendiri). Jika ditelusuri lagi secara spesifik, di dalam bukunya akhirnya didefenisikan bahwa partisipasi politik tidak hanya mencakup kegiatan yang oleh pelakunya sendiri dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan

pemerintah, tetapi juga kegiatan yang oleh orang lain di luar si pelaku dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Pertama dapat dinamakan partisipasi otonom dan yang kedua partisipasi yang dimobilisasikan. Masalah niat dan persoalan yang berkaitan dengannya yakni motivasi-motivasi partisipasi politik merupakan hal yang kompleks dan kontroversial. (Samuel P. Huntington; Joan M. Nelson)

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam buku Partisipasi Politik di Negara Berkembang mendefinisikan konsep partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal (Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang)

Dalam tahapan demokrasi elektoral atau demokrasi prosedural, golput adalah manifestasi politik, dimana rakyat tidak berpartisipasi politik (menggunakan hak pilihnya) secara sukarela dalam pemilihan umum sebagai pesta demokrasi. Secara faktual fenomena golput tidak hanya terjadi di negara demokrasi yang sedang berkembang, di negara yang sudah maju dalam berdemokrasi pun menghadapi fenomena golput, seperti di Amerika Serikat yang capaian angka partisipasi politik pemilihnya berkisar antara 50% s/d 60%, begitu pula di Perancis dan Belanda yang angka capaian partisipasi politik pemilihnya berkisar 86%. Secara kondisional faktor penyebab munculnya golput di negara berkembang dan di negara maju tentunya berbeda. Sebagaimana dikemukakan Varma (2001:295) bahwa:

“Di Negara berkembang lebih disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan hasil pemilu yang kurang amanah dan memandang nilai-nilai demokrasi belum mampu mensejahterakan masyarakat. Kondisi ini jelas akan mempengaruhi proses demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara karena terjadi paradoks demokrasi atau terjadi kontraproduktif dalam proses demokratisasi”.

Karenanya menghadapi fenomena golput yang terjadi lebih disebabkan oleh faktor kekecewaan publik terhadap kinerja partai politik dan pemerintah yang belum efektif, maka menjadi pembelajaran bagi partai politik dan pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya sebagai mesin kerja demokrasi yang efektif dan memiliki komitmen yang kuat, mewujudkan *good public governance*. Ketidakkampuan partai politik dan pemerintah menampilkan kinerja tersebut, maka fenomena golput akan mengkristal menjadi faktor internal demokrasi yang potensial menimbulkan pembusukan demokrasi atau pembusukan politik (*political decay*), sehingga akan berimplikasi melumpuhkan demokrasi, dimana partai politik sebagai mesin pembangkit partisipasi politik dalam demokrasi secara moral ikut bertanggung jawab.

Dalam sub bab latar belakang sebelumnya dikemukakan bahwa perilaku individu diperoleh dari proses interaksi. Hal ini berarti bahwa setiap proses interaksi memiliki makna yang kemudian diinterpretatif oleh individu untuk kemudian direspons menjadi perilaku. Apabila menarik benang merah dalam proses demokrasi, pemilu merupakan bentuk interaksi yang didalamnya terdapat makna. Bagi pemilih golput, pemilu memiliki makna tersendiri dari hasil interaksinya dalam dunia sosial. Untuk itu, dalam pandangan interaksionisme simbolik, perilaku golput merupakan hasil interpretatif dan pemaknaan individu terhadap sistem demokrasi.

Interaksi simbolik pada intinya menjelaskan tentang kerangka referensi untuk memahami bagaimana manusia, bersama dengan orang lain, menciptakan dunia simbolik dan bagaimana cara dunia membentuk perilaku manusia. Interaksi simbolik ada karena ide-ide dasar dalam membentuk makna yang berasal dari pikiran manusia (*Mind*) mengenai diri (*Self*), dan hubungannya di tengah interaksi sosial yang bertujuan akhir untuk memediasi serta menginterpretasi makna di tengah masyarakat (*Society*) dimana individu tersebut menetap. Seperti yang dicatat oleh Douglas (1970) dalam Ardianto (2007: 136), Makna itu berasal dari interaksi dan tidak ada cara lain untuk membentuk makna selain dengan membangun hubungan dengan individu lain melalui interaksi.

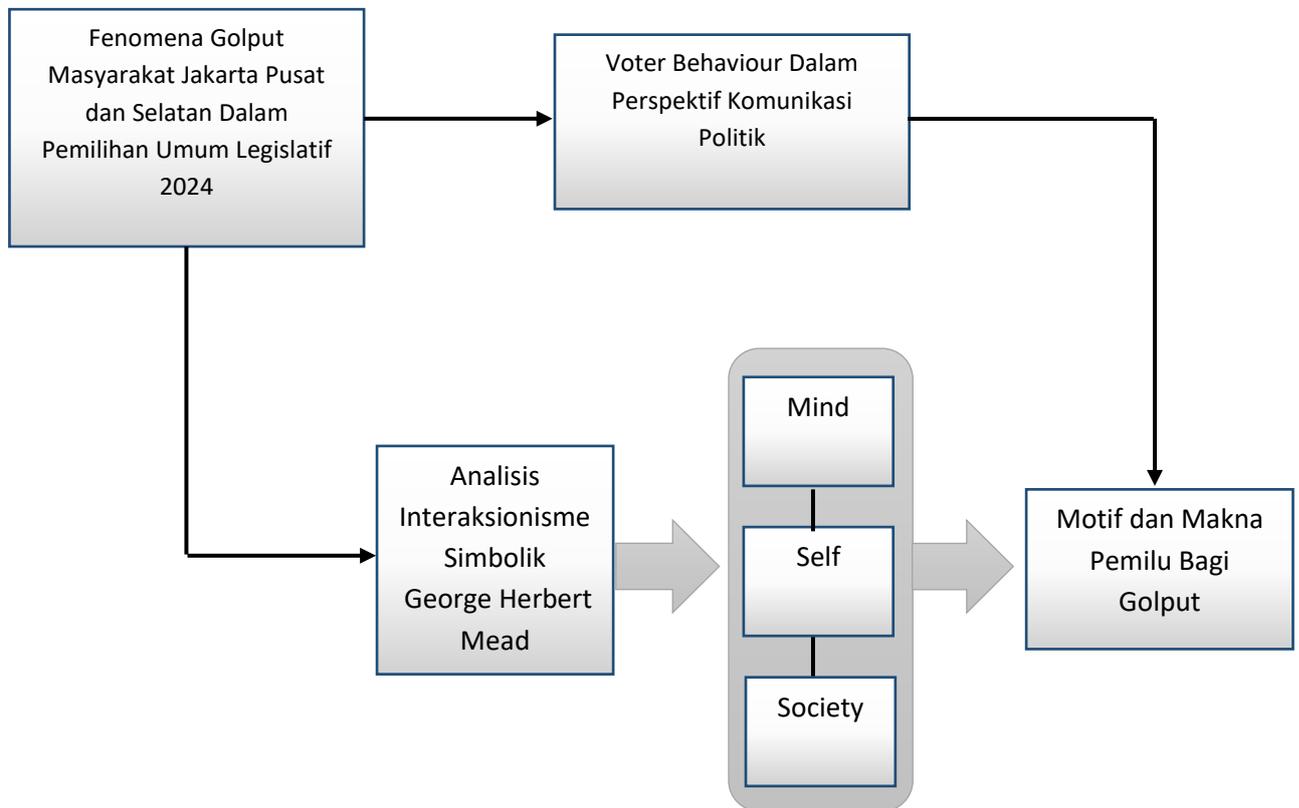
Definisi singkat dari ke tiga ide dasar dari interaksi simbolik, antara lain:

- 1) Pikiran (*Mind*) adalah kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, dimana tiap individu harus mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lain.
- 2) Diri (*Self*) adalah kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain, dan teori interaksionisme simbolis adalah salah satu cabang dalam teori sosiologi yang mengemukakan tentang diri sendiri (*the-self*) serta dunia luarnya.
- 3) Masyarakat (*Society*) adalah jejaring hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan dikonstruksikan oleh tiap individu di tengah masyarakat, dan tiap individu tersebut terlibat dalam perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela yang pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakatnya.

"*Mind, Self and Society*" merupakan karya George Herbert Mead yang paling terkenal (Mead. 1934 dalam West-Turner. 2008: 96). Dalam buku tersebut memfokuskan pada tiga tema konsep dan asumsi yang dibutuhkan untuk menyusun diskusi mengenai teori interaksi simbolik. Tiga tema konsep pemikiran George Herbert Mead yang mendasari interaksi simbolik antara lain:

- a. Pentingnya makna bagi perilaku manusia,
- b. Pentingnya konsep mengenai diri,
- c. Hubungan antara individu dengan masyarakat.

Pandangan interaksionisme simbolik di atas membawa kita pada argumentasi bahwa pemilu merupakan sebuah hasil dan bentuk pemaknaan yang diinterpretatif oleh masyarakat dan dimodifikasi yang kemudian kembali dikomunikasikan melalui proses interaksi. Pemaknaan dan bagaimana seseorang memaknai serta memodifikasi makna dari pemilu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang oleh Mead disebutkan sebagai konsep diri berupa *mind*, *self*, dan *society*.



**Gambar 1** : Bagan Kerangka Pemikiran

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni hanya memaparkan sebuah fenomena dan tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis

atau membuat prediksi. Metode penelitian ini muncul karena adanya situasi yang memandang suatu realitas/fenomena. Metode penelitian ini sering disebut metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Penelitian dilaksanakan pada Maret - Juni 2024 di Kabupaten Bogor. Adapun beberapa kecamatan yang dijadikan sebagai obyek penelitian yaitu, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Gunung Putri, dan Kecamatan Bojong Gede yang tingkat golputnya di atas 15 persen dengan masing-masing jumlah pemilih melebihi 150 ribu pemilih.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis karena paradigma ini menyatakan bahwa individu menginterpretasikan dan beraksi menurut kategori konseptual dari pikiran. Realitas tidak menggambarkan diri individu namun harus disaring melalui cara pandang orang terhadap realitas tersebut.

Paradigma konstruktivisme ialah paradigma dimana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Paradigma konstruktivisme ini berada dalam perspektif interpretatif (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik. Paradigma konstruktivisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis. Menurut paradigma konstruktivisme realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang, seperti yang biasa dilakukan oleh kaum positivis. Konsep mengenai konstruksionis diperkenalkan oleh sosiolog interpretatif, Peter L. Berger bersama Thomas Luckman. Dalam konsep kajian komunikasi, teori konstruksi sosial bisa disebut berada diantara teori fakta sosial dan defenisi sosial.

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor untuk mengetahui persentase dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Penulis berfokus pada lima kecamatan yang menjadi obyek penelitian.

**Tabel 1** : Jumlah Partisipasi Pemilih Dan Golput Pada Pileg 2024 di Lima Kecamatan Kabupaten Bogor

No.	Kecamatan	DPT	Pengguna Hak Pilih	%	Golput	%
1.	Cibinong	259.086	216.640	83,62	42.446	16,38
2.	Citeureup	155.476	129.819	83,50	25.657	16,50
3.	Cileungsi	193.725	159.852	82,51	33.873	17,49

4.	Gunung Putri	212.030	174.998	82,53	37.032	17,47
5.	Bojong Gede	191.205	155.684	81,42	35.521	18,58

*Sumber : KPU Kabupaten Bogor, 2024*

Dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini, penulis melakukannya dengan teknik :

a. Focus Group Discussion

FGD memungkinkan peneliti dan informan berdiskusi intensif dan tidak kaku dalam membahas isu-isu yang sangat spesifik. FGD juga memungkinkan peneliti mengumpulkan informasi secara cepat dan konstruktif dari peserta yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Di samping itu, dinamika kelompok yang terjadi selama berlangsungnya proses diskusi seringkali memberikan informasi yang penting, menarik, bahkan kadang tidak terduga.

b. Wawancara Mendalam

Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) atau wawancara tidak terstruktur yang bertujuan untuk mengetahui pandangan personal subjek penelitian. Responden dapat memberikan jawaban-jawaban secara menyeluruh dan mendalam tentang objek penelitian.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis akan mendokumentasikan responden dengan bentuk tulisan, yaitu data diri responden dan pernyataan-pernyataan responden ketika FGD sedang berlangsung.

Dalam penelitian ini proses pemeriksaan keabsahan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Kemudian hasil dari penelaahan data primer tersebut disusun ke dalam satuan-satuan yang selanjutnya dikategorisasikan. Pada tahap terakhir melakukan penganalisaan data dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan atau kevalidan data. Dalam pemeriksaan keabsahan data ini penulis menggunakan triangulasi sumber.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Makna Pemilu Bagi Golput Dalam Pemilu Legislatif 2024 Kabupaten Bogor**

Berbagai alasan yang dikemukakan oleh pemilih golput saat sesi Focus Group Discussion (FGD) yang kemudian memberi deksripsi temuan mengenai makna pemilu legislatif dan motif golput bagi pemilih golput itu sendiri di lima kecamatan (Cileungsi, Citeurep, Cibinong, Bojong Gede dan Gunung Putri) di Kabupaten Bogor.

Hasil analisis data berdasarkan penemuan membawa penulis pada hasil interpretasi bahwa pemilih golput memberikan makna terhadap pemilu legislatif berdasarkan pengetahuan mereka terhadap sistem demokrasi yang melahirkannya. Selain itu, pengalaman mereka dalam ruang sosial memberikan sumbangan pada makna pemilu legislatif.

Penulis kemudian mengkategorikan pernyataan peserta FGD berdasarkan pemahaman mereka mengenai sistem demokrasi dan pengalaman mereka dalam kehidupan sosial. Berikut ini benang merah di antara pernyataan-pernyataan para peserta FGD pemilih golput mengenai makna pemilu legislatif:

1. Makna pemilu legislatif memiliki makna bagi masyarakat yang golput sebagai bentuk ketidaksepakatan dengan realitas demokrasi Indonesia saat ini. Konsep partisipasi aktif dan persamaan kedudukan dalam setiap tatanan kenegaraan ternyata mengandung unsur diskriminasi. Makna yang timbul dari proses demokrasi Indonesia hanya diperuntukkan bagi golongan yang kuat secara ekonomi.
2. Makna pemilu legislatif memiliki makna sebagai bentuk kegagalan demokrasi sebagai sebuah sistem di Indonesia dikarenakan beberapa unsur pendukung demokrasi tersebut tidak dapat berfungsi maksimal di dalam mengedukasi masyarakat.
3. Makna pemilu legislatif adalah sebuah kewajiban dalam proses demokrasi yang lahir dari rasa tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Jadi, kewajiban akan menjadi tumpul dan menjadi benalu apabila tidak dilandasi oleh kepercayaan dan tanggung jawab. Pemilu legislatif mestinya berangkat dari rasa kepercayaan terhadap sang wakil dan yang diwakilkan. Dengan pedoman nilai kepercayaan ini, tanggung jawab pun bukan menjadi beban bagi wakil rakyat karena kepercayaan selalu melahirkan semangat melayani.
4. Makna pemilu legislatif berikutnya adalah sebuah sistem yang lahir dari demokrasi yang telah melahirkan dan mengajarkan masyarakat untuk berbuat diluar batas demi kepastian terpilihnya menjadi anggota dewan. Pemilu legislatif yang baik lahir dari demokrasi yang sehat dimana caleg tidak perlu menunggu masa kampanye dan menjadi anggota dewan untuk berbakti dan melayani masyarakat. Karena pada hakekatnya demokrasi melahirkan orang-orang yang berbudi pekerti luhur.
5. Makna pemilu legislatif juga dimaknai sebagai sebuah proyek abu-abu. Di satu sisi negara mesti menjamin berjalannya proses demokrasi, di sisi lain negara mengeluarkan mahar untuk sebuah proses yang hasilnya masih tidak jelas.
6. Makna pemilu legislatif sebagai sebuah produk demokrasi, pemilihan umum dan anggota dewan yang terpilih seharusnya memahami betul bahwa demokrasi bukan hanya sekedar kebebasan berekspresi sehingga mematikan potensi individu yang lain. Anggota dewan yang berjumlah ratusan orang tersebut tidak menjamin

bahwa semua lapisan masyarakat terwakili, karena pada akhirnya anggota dewan mengabdikan pada parpol.

Dari pemaparan mengenai makna pemilu legislatif bagi masyarakat golput di Kab. Bogor, dapat kita pahami bahwa setiap individu golput memiliki pengetahuan dan pemahaman yang ideal mengenai makna pemilu yang lahir dari sistem demokrasi. Kemudian, pemahaman ideal tersebut mengalami benturan-benturan makna ketika dihadapkan dengan realitas yang menjadi pengalaman masyarakat yang golput. Dalam pandangan ini, benturan tersebut akan melahirkan sebuah efek negatif mengenai makna pemilu. Timbullah perilaku golput yang kemudian menjadi pesan akan ketidaksepakatan mengenai pemilu legislatif yang lahir dari sistem demokrasi.

## **2. Motif Golput Dalam Pemilu Legislatif 2024 Kabupaten Bogor**

Penjelasan mengenai makna pemilu legislatif masyarakat yang golput ditemukan bahwa pemahaman yang ideal mengenai demokrasi mengalami benturan makna ketika berhadapan dengan realitas pemilu legislatif yang terjadi. Hal ini kemudian melahirkan perilaku golput dalam masyarakat. Ketidaksepakatan dengan pemilu legislatif ini memiliki implikasi temuan penelitian dalam memahami apa sebenarnya yang menjadi motif masyarakat di Kab. Bogor untuk golput.

Berdasarkan pada deskripsi temuan mengenai motif golput, dapat dipahami bahwa pilihan golput hadir untuk memberikan sebuah pesan mengenai sistem demokrasi dan pemilu legislatif yang tidak menghasilkan perubahan kesejahteraan bagi sebagian besar masyarakat. Ada beberapa hal yang dalam temuan penelitian ini diindikasikan merupakan penyebab atau motif masyarakat untuk golput, di antaranya adalah ketidakpercayaan terhadap lembaga pendukung demokrasi, yaitu partai politik, kemudian ketidakpercayaan terhadap para calon anggota legislatif dan bahwa pemilu legislatif tidak akan membawa apa-apa bagi masyarakat dibandingkan dengan pemilihan presiden.

Beberapa bentuk ketidakpercayaan masyarakat disederhanakan melalui pengelompokan pernyataan mengenai motif golput dianggap oleh penulis dapat menjawab fokus penelitian ini. Adapun pengelompokan tersebut adalah :

1. Motif idealis, dimana perilaku golput disebabkan adanya perbedaan pandangan mengenai konsep demokrasi dan sistem pemilihan umum legislatif yang diterapkan oleh penyelenggara hingga melahirkan ketidakpercayaan terhadap sistem demokrasi dan pemilu legislatif.
2. Motif *experience*, dimana perilaku golput dipahami sebagai bentuk kekecewaan terhadap para anggota dewan yang selama ini dipercaya menjadi wakil masyarakat, sehingga pada Pemilu Legislatif 2024 menimbulkan rasa tidak percaya lagi terhadap calon anggota legislatif.

3. Motif institusional, perilaku golput yang disebabkan ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga politik pendukung demokrasi, seperti partai politik dan KPU.

4. Motif individualis, dimana perilaku golput dimotivasi oleh tidak kredibelnya individu-individu calon anggota legislatif dan hanya bisa mengumbar janji-janji saja. Hal ini berkaitan erat dengan motif *experience*.

5. Motif *proximity*, dimana perilaku golput disebabkan masyarakat tidak mengenal calon anggota legislatif. Hal ini karena tidak maksimalnya kampanye yang dilakukan dan perilaku caleg yang biasanya hanya muncul ketika musim kampanye tiba. Ini berkaitan erat dengan motif individualis.

Motif golput merupakan bagian dari konstruksi sosial yang oleh Herbert Mead dalam teorinya Interaksionisme Simbolik disebutnya sebagai makna yang dibentuk oleh individu dari hasil konstruksi secara interpretatif melalui proses interaksi. Terdapat sejumlah faktor yang terkait dalam proses konstruksi sosial, yaitu faktor internal dan eksternal, yang dalam mazhab Weberian disebut sebagai *in order to motive*, sedangkan dalam konsep Alfred Schulzt disebut *because of motive*.

Alfred Schutz menggolongkan motif-motif sebagai “motif untuk” (*in order to motive*) dan “motif karena” (*because of motive*) dalam pandangannya. *In order to motive* merupakan tujuan yang digambarkan sebagai maksud, rencana, harapan, minat, dan sebagainya, yang diinginkan aktor dan karena itu berorientasi ke masa depan. Sedangkan *because of motive* merujuk kepada pengalaman masa lalu aktor dan tertanam dalam pengetahuannya yang terendapkan (*preconstituted knowledge*), dan karena itu berorientasi masa lalu.

Dalam interaksi, “motif untuk” tindakan seseorang menjadi “motif karena” disebabkan oleh reaksi orang lain. Max Weber dalam memperkenalkan konsep pendekatan *verstehen* untuk memahami makna tindakan seseorang, dimana seseorang dalam bertindak tidak hanya sekedar melaksanakan, tetapi juga menempatkan diri dalam lingkungan berpikir dan perilaku orang lain. Konsep ini lebih mengarah pada suatu tindakan bermotif pada tujuan yang hendak dicapai atau *in order to motive*.

Pemahaman makna tindakan dengan pendekatan *verstehen* mendapat koreksi dari Alferd Schutz. Dia menyatakan bahwa tindakan para aktor tidak muncul begitu saja, tetapi ada yang melalui suatu proses panjang untuk dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan norma etika agama atas dasar tingkat kemampuan pemahaman sendiri sebelum tindakan itu dilakukan. Dengan kata lain, sebelum masuk pada tataran *in order to motive*, menurut Schutz ada tahapan *because of motive* yang mendahuluinya (Muhamad Basrowi dan Soeyono, 59-60: 2004).

Untuk lebih memahami motif mana yang lebih dominan dari lima motif pemilih golput pada Pemilu Legislatif 2024 di Kabupaten Bogor berdasarkan *in order to motive* dan *because of motive* dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2:** Motif Golput pada Pileg 2024 Menurut *In Order to Motive* dan *Because of Motive*

Sumber : Diolah oleh Peneliti, Juni 2024

No.	Motif Golput Pemilu Legislatif 2024 di Kab.Bogor	Masa Lalu ( <i>in order to motive</i> )	Masa Depan ( <i>because of motive</i> )
1	Idealis	#####	Perbedaan pandangan konsep demokrasi dan pemilu legislatif yang ideal.
2	Experience	Kecewa pada anggota dewan yang tidak aspiratif.	#####
3	Institusional	Ketidakpercayaan pada lembaga politik pendukung demokrasi (parpol dan KPU) .	#####
4	Individualis	Calon anggota legislatif hanya mengumbar janji dan tidak ada program riil.	#####
5	Proximity	Tidak mengenal calon dan hanya muncul saat kampanye.	#####

Temuan motif golput dalam penelitian ini juga mengindikasikan bahwa pilihan golput masyarakat Kabupaten Bogor lebih didasarkan pada faktor individu-individu yang mengalami secara langsung pengalaman demokrasi. Pandangan ini hampir mirip dengan apa yang dikatakan oleh Huntington dan Joan M Nelson serta Varma, yang melihat partisipasi politik dalam pemilu di negara berkembang (Indonesia) ditengarai pada kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan hasil pemilu yang kurang amanah dan memandang nilai-nilai demokrasi belum mampu mensejahterakan masyarakat.

Hasil analisis data sebelumnya, makna pemilu legislatif bagi pemilih golput dipahami sebagai bentuk pengetahuan awal mereka mengenai makna demokrasi yang ternyata dalam beberapa hal tidak mensinergikan pada keluaran produk pemilu legislatif. Untuk itu, pengalaman dari pemilih golput dalam memaknai pemilu legislatif juga menjadi kabur. Banyak hal dari pemahaman demokrasi pemilih golput dikebiri oleh kepentingan-kepentingan kelompok melalui kekuatan ekonomi.

Berkaitan dengan kepentingan kelompok, penulis memberikan apresiasi tersendiri mengenai hal ini. Kepentingan kelompok berdasarkan hasil penelitian ini dapat diartikan sebagai partai politik atau upaya partai politik dalam mendukung proses demokrasi di Tanah Air. Lebih dalam bahkan Schattscheider (1942), mengungkapkan bahwa "*Political parties created democracy*". Karena itu, partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Bahkan, oleh Schattscheider dikatakan pula, "*Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties*".

Jadi secara gamblang partai politik bisa berarti organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Dalam bahasa yang lain partai politik bisa berarti kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara yang konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Tentunya partai politik bukan sekedar sebuah lembaga politik saja, perubahan-perubahan dinamika politik yang berdasarkan sistem demokrasi dari zaman ke zaman turut mengubah fenomena partai politik di Indonesia. Sejak era Reformasi beberapa fenomena politisi sebagai penjawantahan lembaga politik (parpol) dapat terlihat dengan jelas, hal ini juga terlihat dalam beberapa fakta temuan penelitian yang membicarakan mengenai partai politik.

Di era Reformasi dimana keran kebebasan kembali dibuka setelah lama dipasung ketika masa Orde Baru berlangsung membuat banyak partai politik menjadi meningkat dalam hal jumlah. Diakui atau tidak dalam era sekarang ini sistem yang menganut jumlah partai yang banyak (multipartai) membuat kinerja negara yang menganut sistem presidensial menjadi tidak efektif. Hal itu terbukti dalam pemerintahan yang terbentuk di masa Reformasi, mulai dari pemerintahan BJ. Habibie, pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid, pemerintahan Megawati Soekarnoputri, pemerintahan SBY jilid 1 maupun jilid 2, sampai pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) jilid 1 dan 2. Keperluan mengakomodasikan kepentingan banyak partai politik untuk menjamin dukungan mayoritas di parlemen sangat menyulitkan efektifitas pemerintahan, termasuk pemerintahan SBY-Boediono, Jokowi – JK, dan Jokowi – KH. Ma'Ruf Amin saat ini.

Sulit dibantah keadaan partai politik yang ada sekarang semakin membuat publik kurang percaya dengan kredibilitasnya mengingat banyaknya kasus yang membelit satu per satu kader partai. Selain itu ada semacam trend fenomena yang terjadi dalam era Reformasi sekarang ini dimana banyak kita temukan antara lain :

1. Politisi ‘bajing loncat’ atau ‘kutu loncat’. Sering kita temukan beberapa politisi yang pindah-pindah partai menurut selera dan analisis mereka terhadap peluang yang dapat diraih untuk mencapai karier dalam dunia politik. Partai politik berganti-ganti nama. Beberapa partai politik harus mengganti namanya untuk membedakan ketua umum dan partai tersebut dengan rival politiknya dalam partai induk (sebelumnya).
2. Partai politik mengusung nilai-nilai keagamaan. Apapun dilakukan untuk menjadi “kendaraan” politik agar tujuan mendominasi kekuasaan mencapai sasaran.
3. Politisi yang indisipliner semakin merajalela dan tak terkendali lagi keberaniannya. Mereka kini berani terang-terangan membohongi rakyat yang mempercayainya dan memberi amanah untuk menyampaikan pesan dan aspirasi sebagaimana yang dijanjikan dalam sumpah jabatan dan selama pemilihan menuju karir politiknya.
4. Konsentrasi politisi kita kebanyakan mengurus obyek-obyek yang memberikan pemasukan ketimbang mengutamakan visi dan misi yang dibebankan kepadanya sebelum mereka mencapai posisi tersebut. Proses tercetaknya kader secara instan dan sistem rekrutmen calon politisi dan diplomat akhir-akhir ini ditengarai sebagai kontributor utama menghasilkan “rombongan” politisi bermasalah di negeri ini.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Ada dua hal yang dapat diuraikan dan kemudian disederhanakan menjadi kesimpulan penelitian, yakni menelaah hasil analisis data yang menyatakan mengenai makna pemilu bagi golput dan motif golput tidak memilih pada Pemilihan Umum Legislatif 2024. Untuk memberikan deskripsi yang lebih jelas berikut adalah uraian kesimpulan penelitian :

1. Makna pemilu bagi golput
  - a. sebagai bentuk ketidaksepakatan dengan realitas demokrasi Indonesia saat ini.
  - b. sebagai bentuk kegagalan demokrasi dikarenakan beberapa unsur pendukung demokrasi tersebut tidak dapat berfungsi maksimal di dalam mengedukasi masyarakat.
  - c. sebuah kewajiban dalam proses demokrasi yang lahir dari rasa tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat.

- d. sebuah sistem yang lahir dari demokrasi yang saat ini telah melahirkan dan mengajarkan masyarakat untuk berbuat diluar batas demi kepastian terpilihnya menjadi anggota dewan.
  - e. sebagai sebuah proyek abu-abu.
  - f. sebagai sebuah produk demokrasi dimana anggota dewan mengabdikan pada parpol dan bukan kepada masyarakat.
2. Motif golput masyarakat Kabupaten Bogor pada Pileg 2024 adalah motif ketidakpercayaan. Adapun bentuk ketidakpercayaan tersebut adalah :
- a. Motif idealis
  - b. Motif experience
  - c. Motif institusional
  - d. Motif individualis
  - e. Motif proximity

Adapun saran yang kemudian bisa dijadikan rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah saran yang merujuk pada kepentingan akademis dan praktis serta yang merujuk pada kepentingan pemaknaan pemilu dan motif masyarakat memilih golput. Mengenai saran akademis, untuk penelitian selanjutnya yang juga berfokus pada motif masyarakat memilih golput lebih mendalami beberapa tinjauan teoritis seperti korelasi antara pemilu dan kekuasaan serta kepentingan kelompok dalam proses demokrasi.

Sementara saran praktis merekomendasikan pada aktor-aktor politik di Indonesia agar lebih memperhatikan fenomena golput di Indonesia. Mengingat dalam penelitian ini motif golput merupakan cerminan dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap banyak hal dalam sistem demokrasi. Partisipasi politik pemilih dalam menyalurkan hak pilih pun cenderung lebih dimobilisasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arianto Bismar. 2010. Analisis Penyebab Perilaku Tidak Memilih Masyarakat Provinsi Riau Pada Pileg 2009. Kep.Riau. Jurnal Komunikasi Politik Universitas Muhamadiyah Riau.
- Budiardjo, M. (2017). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, M. (1996). Demokrasi Di Indonesia: Demokrasi Parlementer Dan Demokrasi Pancasila. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Huntington Samuel P , Nelson John M .1994. No Easy Choice Political Participation in Developing Countries. Harvard University Press.
- LittleJohn, Stephen W. 2005. Theories of Human Communication Edisi 9 Terjemahan. Jakarta. Salemba Humanika.
- Nie, N.H. & Verba, S. (1975), Political Participation, Handbook Of Political Science. Addison-Wesley Publishing Company.

- Nyarwi. 2006. Golput Pasca Orde Baru : Merekonstruksi Ulang Dua Perspektif. Yogyakarta. Jurnal Komunikasi Politik Universitas Gadjah Mada.
- Soubagio H . 2002. “Implikasi Golongan Putih Dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi Indonesia”. Jakarta. Jurnal Politik Universitas Indonesia.
- Varma, S.P. (2001). Teori Politik Modern. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- West, Richard dan Lynn H. Turner. 2008. Pengantar teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi. Buku 1 edisi ke-3. Terjemahan. Maria Natalia.
- Yin, Robert K. 1997. Studi Kasus (Desain dan Metode). Jakarta: Raja Grafindo Persada.